

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, oleh karena itu metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum, karena ilmu hukum memiliki karakter yang khusus (*sui generis discipline*). Merupakan suatu penelitian untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan masalah otonomi daerah dan kewenangan pemerintah baik pusat dan daerah di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisa wewenang pemerintah mengatur kebebasan dalam memperoleh pendidikan, khususnya untuk sekolah SMA dan SMK di Kota Surabaya. Menjelaskan dan menganalisa dampak-dampak atau konsekuensi yang timbul akibat diterapkannya Peraturan Walikota No 13 Tahun 2012 mengenai pengaturan pendidikan gratis di Kota Surabaya.

Dari hasil penelitian ini didapatkan penjelasan mengenai latar belakang dibuatnya Peraturan Walikota No 12 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Tahun 2012, dan konsekuensi diberlakukannya peraturan tersebut terhadap pendidikan di Kota Surabaya khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Kata Kunci : Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, Sekolah Gratis, Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).